PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Andita Putri Lestari
No Mahasiswa	: 14311630
Jurusan	: Manajemen
Bidang Konsentrasi	: Keuangan

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK SYARIAH

SKRIPSI

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar stara-1 di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Andita Putri Lestari
Nomor Mahasiswa	: 14311630
Jurusan	: Manajemen
Bidang Kosentrasi	: Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memeperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis attau diberikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 18 Juli 2018

Penulis



Andita Putri Lestari

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA BANK SYARIAH

Nama	: Andita Putri Lestari
Nomor Mahasiswa	: 14311630
Jurusan	: Manajemen
Bidang Kosentrasi	: Keuangan

Yogyakarta, 06 Juli 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Sutrisno, MM

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK SYARIAH

Disusun Oleh : **ANDITA PUTRI LESTARI**

Nomor Mahasiswa : **14311630**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 13 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sutrisno, Dr.,Drs., MM. .....

Penguji : Zaenal Arifin, Dr., M.Si. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah bersyukur atas kehadirat Allah SWT dan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tulus, perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada saya, kedua orang tua yang luar biasa hebatnya :

Uuk Lukmantara, S.E

&

Eeng Chaeriyah

Terimakasih atas waktu, pengorbanan, tenaga dan doa yang tulus diberikan untuk anakmu, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga dapat melihat apa yang selalu ayah ibu impikan, serta selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Teruntuk kedua adik saya tercinta terimakasih atas segala dukungan yang diberikan selama ini:

Belanikha

&

Derina Nofanti

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqara - 286)

“Menjadi yang terbaik diantara yang terbaik”

(Andita Putri Lestari)

“Kegagalan dan masalah adalah pembelajaran untuk hidup yang lebih baik”

***(*Andita Putri Lestari)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen *Corporate Governance* terdiri dari Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) di Indonesia pada periode 2014-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh penelitian sebanyak 11 Bank Syariah. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 sampel. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengukuran pengungkapan *Islamic Social Reporting* mengacu pada penelitian Othman (2010). Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia 2014-2017. Sedangkan frekuensi rapat dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Profitabilitas, *Islamic Social Reporting*.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of the element of corporate governance consisting of the frequency of board of syariah controller meetings, the composition of board of independent commissioner, the size of board of directors , audit committee size, and profitability influence the Islamic Social Reporting (ISR) in Indonesia period 2014-2017. Population in this study are all Islamic Bank in Indonesia were 12 bank. The sampling technique used was purposive sampling and samples in this study were 11 Islamic Bank. The number of samples in this study were 44 samples. This research method is a quantitive approach. The data type used in this research were secondary data. The hypothesis was tested using multiple regression method. Measurement of Social Disclosure Reporting Islam refers to the research of Othman (2010). The result showed that audit committee size has positive and significant impact on the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) in Indonesia period 2014-2017. While frequency of board of syariah controller meetings, composition of board of independent commissioner, size of board of directors, and profitability no effect on disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) in Indonesia period 2014-2017.

Keywords: *Corporate Governance, Board of Sharia Supervisory, Independent Commissioners, Board of Directors, audit committee, profitability, Islamic Social Reporting.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah**"

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak dapat lepas dari hambatan dan ksulitan. Namun segalanya dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bpk Dr. Drs. Dwipraptono agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bpk Dr. Drs. Sutrisno, MM. Selaku Ketua Prodi Manajemen sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya serta telah sangat sabar dan bijaksana dalam memberikan arahan ataupun petunjuk selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah

SWT senantiasa melindungi, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup Bapak.

3. Seluruh Dosen Fakuktas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis. Dan seluruh karyawan dan staff tata usaha FE UII yang turut membantu dalam kelancaran segala urusan selama menempuh pendidikan di kampus ini.
4. Kepada Bpk Bagus Panuntun, SE., MBA yang telah sabar dan banyak meluangkan waktu untuk berkonsultasi ataupun berdiskusi. Semoga Bapak selalu di lindungi oleh Allah SWT dan selalu diberikan kebahagiaan dalam hidupnya.
5. Deisty Putri N, terimakasih sudah selalu ada baik suka maupun duka, terimaksih atas kesabarannya serta dukungannya selama sepuluh tahun ini.
6. Valista Astuti, terimakasih sahabat seperjuangan yang tiada pernah henti mendorong dan mendukung untuk terus semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Dia Ayu Pitaloka, Nabila Flodesa, Mia Muji, dan Eva Kusuma terimakasih sahabat yang sudah selalu ada baik suka maupun duka, terimakasih sudah sabar, selalu menyemangati dan menjadi tempat keluh kesah selama ini.

8. Sahabat-sahabat kampus yang selalu mendukung dan memotivasi selama ini Well, Yorin, Uri, Risna, Nabila, Yuke, Najla, Putri, Rifan, Ginang, Marina, Nadhila, Anike, Mia H, Rajeng, Adip, Diki dan Uti.
9. Sahabat-sahabat basket selama dua belas tahun yang selalu menyemangati dalam menyusun skripsi Putik, Amel, Vivi dan Indah.
10. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat dijadikan khasanah pustaka yang mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2018

Penulis,

Andita Putri Lestari

DAFTAR ISI

Halaman Judul…….. i

Halaman Sampul Depan Skripsi…… ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme……... iii

Halaman Pengesahan Skripsi……. iv

Halaman Pengesahan Ujian……... v

Halaman Persembahan…….. vi

Halaman Motto…….. vii

Abstraksi…… viii

Kata Pengantar…….. x

Daftar Isi…… xiii

Daftar Tabel……... xvi

Daftar Gambar……... xvii

Daftar Lampiran…… xviii

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 10

BAB 2 11

KAJIAN PUSTAKA 11

2.1 Corporate Governance 11
2.1.1 Dewan Pengawas Syariah 13
2.1.2 Dewan Komisaris 14
2.1.3 Dewan Direksi 16
2.1.4 Komite Audit 18

2.2 *Islamic Social Reporting* (ISR) 20

2.3 Penelitian Terdahulu 26

2.4 Pengembangan Hipotesis 30
2.4.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 30
2.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 31
2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 32
2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 33
2.4.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 34

BAB III 36

METODE PENELITIAN 36

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 36

3.2. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 37

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 38
3.3.1. Variabel Independen 38
3.3.2. Variabel Depeden 39
3.4. Variabel Kontrol 40

3.5 Alat Analisis 40
3.5.1 Statistik Deskriptif 40
3.5.2 Pengujian Asusmsi Klasik 41
3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda 42
3.5.4 Uji Parsial (Uji-t) 43
3.5.5 Uji Simultan (Uji-F) 43
3.5.6 Uji Koefesien Determinasi ($R2$) 44

BAB IV 45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

4.1 Statistik Deskriptif 45

4.2 Uji Asumsi Kalsik 47
4.2.1 Uji Normalitas 47
4.2.2 Uji Multikolinearitas 48
4.2.3 Uji Autokorelasi 50
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 51

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 52

4.4 Uji Parsial (Uji-t) 53

4.5 Uji Simultan (Uji-F) 55

4.6 Koefesien Determinasi ($\boldsymbol{R2}$) 55

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data 56
4.7.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 56
4.7.3 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 57
4.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 58
4.7.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 59
4.7.6 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) 60

BAB V 62

PENUTUP 62

5.1 Kesimpulan 62

5.2 Keterbatasan 64

5.3 Saran 64

DAFTAR TABEL

1.1 PERKEMBANGAN TOTAL ASSET DAN DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA..…….....2

3.1 DAFTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA…….....37

4.1 DESKRIPTIF VARIABEL 46

4.2 UJI NORMALITAS 48

4.3 UJI MULTIKOLINEARITAS 49

4.4 UJI AUTOKORELASI 50

4.5 UJI HETEROKEDASTISITAS 51

4.6 UJI REGRESI LINIER BERGANDA 52

4.7 UJI PARSIAL (UJI-T) 53

4.8 UJI SIMULTAN (UJI-F) 55

4.9 UJI KOEFESIEN DETERMINASI (***R2***) 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran……35

DAFTAR LAMPIRAN

PENGUNGKAPAN ISR TAHUN 2014..... 70

PENGUNGKAPAN ISR TAHUN 2015..... 71

PENGUNGKAPAN ISR TAHUN 2016..... 72

PENGUNGKAPAN ISR TAHUN 2017..... 73

PENGUNGKAPAN ITEM-ITEM..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia perbankan syariah yang ada di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari umat muslim, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bank syariah akan selalu diminati banyak orang. Agama Islam meyakini bahwa menjalankan aktivitas perbankan juga memerlukan syariat islam sebagai dasar untuk beribadah kepada Allah SWT. Tujuan dari syariat islam dalam aktivitas perbankan ialah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidakjelasan (gharar), maisir (judi dan spekulatif), bunga (riba) dll.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah masih ada beberapa hambatan yang muncul dari realitas perkembangan industri keuangan syariah di Indoensia, diantaranya ialah tingkat pengetahuan dan pemahan umat mengenai bank syariah masih rendah, itu belum terlihat adanya gerakan bersama dalam skala yang besar untuk mempromosikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, masih terbatasnya pakar dan sumber daya manusia ekonomi syariah, peran pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah masih kurang, peran ustad, ulama, da'I, peran pendidikan di perguruan tinggi yang bukan perguruan tinggi islam masih belum optimal, peran Organisasi Mahasiswa Islam belum sepenuhnya mendukung dan membantu gerakan lembaga keuangan syariah

masyarakat masih menganggap bahwa sistem ekonomi syariah masih sama fungsinya dengan lembaga keuangan lain.

Table 1.1

Pekembangan Total Asset dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017

Jumlah Perbankan Syariah	**Tahun**			
	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Total Aset Bank Umum Syariah	204.961	213.423	254.184	288.027
Total Aset Unit Usaha Syariah	67.383	82.839	95.470	135.153
Dana Pihak Ketiga BUS dan UUS	217.858	231.175	279.335	334.719

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2017

Dari tebel pertumbuhan perbankan syariah tahun 2014-2017 (www.ojk.go.id, 2017) jumlah Total Asset dan DPK perbankan syariah Desember 2017 tercatat sebanyak 288.027 Total Asset BUS, 135.153 Total Asset UUS dan 334.719 Jumlah Dana Pihal Ketiga BUS dan UUS.

Sesuai dengan Undang Undang no 21 tahun 2008 pasal 7 " Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas", sehingga dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus memacu pada Undang Undang no 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas (PT) yang menyatakan bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang biasa disebut dengan TJSL. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dengan memperhatikan kepatutan

kewajran. (3) Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (Permata & Mildawati, 2013).

Tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat umum. CSR merupakan seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun informasi non-keuangan yang perlu diketahui pemegang saham, calon investor, pemerintah atau bahkan masyarakat (Johan & Eke, 2016). Konsep CSR tidak hanya berkembang di segi ekonomi konvensional melainkan ekonomi islampun juga menjadi keharusan bagi semua perbankan syariah untuk menerapkan CSR. Biasanya pengungkapan CSR dalam konsep Islam dinamakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jika semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan pada lingkungannya, maka masyarakat akan semakin baik memandang citra suatu perusahan.

Indeks *Islamic Social Reporting* adalah perluasan dari *social reporting* yang isinya bahwa harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi peran perusahaan akan perspektif spiritual (Haniffa, 2002). Indeks *Islamic Social Reporting* berisi komplikasi item-item standar CSR yang

telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* atau disingkat dengan AAOIFI lalu dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh entitas islam (Othman, 2009).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan informasi ialah penerapan *corporate governance*. Implementasi tata kelola (*Corporate Governance*) perusahan menjadi keharusan bagi bank syariah, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan citra yang baik untuk bank syariah, yang akhirnya berdampak pada kinerja keuangan dan berkelanjutan dari bank syariah (Indra, Ubud, & Eko, 2017). Tingginya persaingan membuat perusahaan bersusah payah untuk mendapatkan citra dan persepsi yang baik dari setiap pemegang kepentingan. Hal tersebut membuat perusahaan harus mampu berjalan seimbang dengan memperhatikannya tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Santoso, 2017).

Terdapat lima prinsip membentuk tata kelola perusahaan yang baik, pertama transparansi (*transparancy*), kedua akuntabilitas (*accountability*), ketiga pertanggungjawaban (*responsibility*), ketiga kemandirian (*independency*), dan terakhir kewajaran (*fairness*). Dalam membentuk *corporate governance* yang baik, perusahaan juga memerlukan dukungan dari seluruh organ yang ada dalam perusahaan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan perusahaan.

Didalam *Corporate Governance* terdapat organ-organ perusahaan seperti dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang akan mempengaruhi pengungkapan ISR. Dalam lembaga keuangan syariah, keberadaan dewan pengawas syariah (DPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit juga ikut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi perusahaan (Bukair & Rahman, 2015). Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang sangat penting, karena dewan pengawas syariah yang mengatur *corporate governance* pada Bank Syariah.

Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya dan hasil yang telah ditelitipun berbeda-berbeda antara peneliti satu dan peneliti lainya. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah frekuensi rapat dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan profitabilitas.

Faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap ISR karena semakin sering rapat dilaksanakan maka akan semakin baik pengawasan terhadap pengungkapan ISR yang dilaksanakan. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Al-Tuwaijiri, 2004) yang menyatakan bahwa dewan pengawasan syariah terdapat proses pengawasan atas pengungkapan peran serta bank syariah dalam pemberdayaan dan kelestarian lingkungan, maka semakin sering DPS mengadakan suatu pertemuan (rapat) pengungkapan aspek lingkungan akan menjadi semakin luas. Pernyataan sebelumnya di bantah oleh (Purwanti,

2016) menghasilkan pernyataan bahwa frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan aspek produk atau jasa dan lingkungan berdasarkan ISR.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah Komposisi Dewan Komisaris . Penelitian terdahulu menurut (Baidok & Septiarini, 2016) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin besar jumlah komisaris independen maka akan semakin mudah perusahaan untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas manajemen. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Lestari, 2013) komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah Dewan Direksi. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Othman, 2009) terdapat hubungan secara signifikan terkait karakteristik perusahaan seperti ukuran, profitabilitas dan komposisi dewan. Meskipun didalam penelitiannya mengkategorikan komposisi dewan menjadi direktur muslim dan direktur non-muslim dan dalam hipotesis tersebut jika lebih banyak direktur muslim pada dewan direksi akan menghasilkan tingkat yang lebih tinggi dari ISR. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu & Cahyati, 2014) menunjukkan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR

Faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah Komite Audit. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Mahdalena, 2017) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Artinya semakin banyak ukuran komite audit maka semakin baik peran dan pemantauan dalam pengendalian yang dilakukan oleh komite audit. Hal tersebut membuat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan akan semakin luas. Namun penelitian (Mahdalena, 2017) dibantah oleh penelitian (Hartawati, Sulindawati, & Kurniawan, 2017) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* di *Jakarta Islamic Index* (JII). Meskipun dalam penelitian yang telah dilakukan mereka bukan untuk perusahaan bank syariah akan tetapi penelitiannya berkesinambungan dengan apa yang dicari. Artinya pada *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal laporan keuangan, pengawasan kontrol, dan tata kelola perushaaan. Hal ini berarti menunjukan bahwa seberapapun jumlah anggota komite audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR.

Profitabilitas digunakan pada setiap perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. Bagi bank, menjaga profitabilitas tetap stabil bahkan meningkat sangat penting karena untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, untuk meningkatkan daya tarik investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki pada suatu bank (Defri, 2012). Penelitian yang telah

dilakukan oleh (Setiawan, Asnawi, & Sofyani, 2016) menyatakan bahwa profitabilitas dan manajemen laba yang diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* tidak terdukung. Hal tersebut bisa jadi dikarekan dana yang digunakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh bank syariah bukan berasal dari profit yang dihasilkan dari bank syariah melainkan berasal dari dana zakat, infaq, sadaqah ataupun pendapatan tidak halal. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rosiana, Arifin, & Hamdani, 2015) dimana hasil dari penelitiannya ialah tidak adanya pengaruh antara profitabilitas yang diukur denagn menggunakan *Return on Asset* terhdap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Menurut mereka dalam pandangan islam perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan pengungkapan secara penuh tidak akan mempertimbangkan lagi jika perusahaan itu untung ataupun rugi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

3. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Perbankan Syariah di Indoensia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu secaara teoritis dan secara praktis.

1. Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber referensi atau acuan pembaca yang akan mengembangkan ISR (*Islamic Social Reporting*) kaitannya dengan Perbankan Syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menetapkan kebijakan ISR (*Islamic Social Reporting*) dalam mengembangkan *Corporate Governance* dan Profitabilitas.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk peneliti selanjutnya terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap pengungkapan ISR.
4. Penelitian ini diharapkan dapat membedakan antara bank syariah atau bank konvensional dalam segi tanngung jawab sosial dan lingkungan (*Islamic Social Reporting*).

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Corporate Governance

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Bank diwajibkan melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanakan GCG yang harus diwujudkan ialah :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
5. Batas maksimum penyaluran dana.
6. Transparan kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Implementasi tata kelola perusahaan menjadi keharusan bagi bank syariah, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang optimal dapat meningkatkan

kepercayaan publik dan memberikan citra yang baik untuk bank syariah, yang akhirnya berdampak baik pada kinerja keuangan dan berkelanjutan. (Siswanti, Ubud, & Ganis, 2017). Terdapat lima konsep dari GCG (Kaihatu, 2006) ialah :

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Kemandirian (*Independency*) yaitu, suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) yaitu, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu system yang meliputi input, proses dan output seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham,

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Adanya GCG untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya menyimpangan dalam menerapkan stategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadinya kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dengan segera (Faozan, 2013).

2.1.1 Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, sepanjang kegiatan bank mempersoalkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ISR yang lebih condong sebagai tanggung jawab manajemen. Dewan pengawas syariah terdiri dari tiga orang atau lebih dengan profesinya yang ahli dalam bidang hukum islam, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah , fungsinya untuk memberikan fatwa agama terutama pada produk-produk Bank Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diijinkan untuk merangkap jabatan pada empat lembaga keuangan syariah lainnya, jadi dengan hal ini bahwa merangkap jabatan DPS diperbolehkan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Antonio, 2007). Selain itu DPS juga mempunyai fungsi (Muhammad, 2005) :

(1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usah Syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

(2) Sebagai mediator antara bank dan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

(3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Bank yang akan membentuk DPS dalam rangka perubahan kegiatan usaha atau membuka kantor cabang syari'ah untuk pertama kalinya dapat menyampaikan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN.

Rapat merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk diskusi dan memberikan saran kepada manajemen perusahaan mengenai kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Jumlah pertemuan yang diadakan oleh dewan pengawas syariah akan semakin mampu untuk mendorong manajemen dalam melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.

2.1.2 Dewan Komisaris

Dalam teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali tertinggi. Dewan Komisaris menurut Peraturan Bank Indonesia Tentang

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Syariah adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 2013). Dewan komisaris independen merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi, memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas manajemen Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dana atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memicu kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan Komisaris juga merupakan satu elemen terpenting dalam mekanisme *corporate governance*, alasannya dengan adanya dewan komisaris didalam suatu perusahaan akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian dengan baik bagi manajemen perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Dengan pengawasan yang baik, maka pengungkapan *islamic social reporting* akan semakin luas.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan tugas sesuai GCG.
2) Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank.
3) Mengawasi pelaksanaan tuags dan memberi nasihat kepada direksi, tapi dilarang mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
4) Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern.
5) Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
6) Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.
7) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu meng-*update*-nya.
8) Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
9) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris minimal tentang waktu kinerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.
10) Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada bank Indonesia.

2.1.3 Dewan Direksi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah, Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tugas dari dewan direksi ialah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dan direksi wajib mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi akan dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi bank yang sahamnya tercatat di bursa dan bank-bank yang besar, proses pencalonan, pemilihan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui *Nomination Committee*. Anggota Direksi diharuskan memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta lulus *fit and proper test* dari Otoritas Pengawas Bank.

Direksi diketuai oleh Presiden Direktur yang tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepengurusan bank secara efektif dan efesien. Presiden Direktur diwajibkan untuk membuat Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampun bekerja secara transparan dan masing-masing anggota dapat berperan sebagai anggota tim maupun dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati. Presiden Direktur diharuskan independen terhadap pemegang saham pengendali. Direksi memiliki hak dan kewajiban untuk :

a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar bank.
b. Mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek.
c. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen risiko dan sistem pengendali internal (*internal control system*).

2.1.4 Komite Audit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Komite Audit ialah kepanjangan dari tangan dewan komisaris dalam hal pengawasan kinerja perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dalam penelitian ini komite audit diukur dari jumlah komite audit yang ada pada perusahaan dalam laporan *corporate governance*. Pernyataan yang telah diungkapkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) komite audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal laporan keuangan, pengawasan atau manajemen risiko dan kontrol, dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Menurut Komite Nasional *Good Corporate Governance*, Tanggung jawab dalam hal pelaporan keuangan ialah meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan audit eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ektern, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Tanggung jawab dalam hal manajemen risiko dan kontrol ialah meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko

dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. Tanggung jawab dalam hal *corporate governance* ialah meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite Nasional *Good Corporate Governance* menjabarkan fungsi-fungsi komite audit agar efektif, diantaranya :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan control yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
4. Membantu Direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan dimana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.

7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal.

2.2 *Islamic Social Reporting* (ISR)

Islamic Islamic Social Reporting (ISR) adalah pelaporan sosial yang mencakup tidak hanya harapan yang lebih luas dari masyarakat berkaitan juga dengan peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pada perspektif spiritual (Haniffa, 2002). *Islamic Social Reporting* mempunyai landasan dasar yaitu prinsip syariah. Aspek-aspek yang dihasilkan dari prinsip syariah ialah material, moral, dan spiritual yang dijadikan fokus utama pada pelaporan sosial perusahaan. Tujuan dari ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta meningkatkan transparasi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam mengambil keputusan. *Islamic Social Reporting* mempunyai 2 tujuan utama. Tujuan pertama ialah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat. Tujuan kedua ialah untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara memberikan informasi yang relevan serta sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan umat islam (Haniffa, 2002).

Bentuk Akuntabilitas diantaranya adalah :

a. Menyediakan produk yang halal dan baik.
b. Memenuhi hak-hak Allah SWT dan masyarakat.

c. Mengejar keuntungan yang wajar dengan prinsip Islam.
d. Mencapai tujuan usaha bisnis.
e. Menjadi karyawan dan masyarakat.
f. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis.
g. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah.

Bentuk Transparansi diantaranya ialah :

a. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram yang dilakukan.
b. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi.
c. Memberikan informasi yang relevan mengenai kebijakan karyawan.
d. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat.
e. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan lingkungan.

Terdapat lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup kemudian dikembangkan lagi oleh Othman (2009) dengan menambahkan satu tema yaitu Tema Tata Kelola Perusahaan. Berikut penjelasan mengenai 6 tema pada ISR :

1. Tema Pendanaan dan Investasi

Pengungkapan pada tema pendanaan dan investasi adalah praktik operasional perusahaan jika mengandung *riba*, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat (Haniffa, 2002). *Riba* didalam dunia perbankan merupakan pendapatan dan beban bunga. Kegiatan pendanaan dan investasi yang mengandung *riba* dan *gharar* harus dilaporkan kepada masyarakat secara transparan dan jelas. Meskipun aturan yang sudah ada bahwa bank syariah tidak diperbolehkan menggunkan *riba* dan *ghara*r namun masih ada saja yang secara tidak langsung praktiknya berhubungan dengan bank konvensional yang masih melakukan kegiatan dengan unsur *riba* dan *gharar*.

Aspek lain yang perlu diungkapkan ialah praktik pembayaran dan pengelolaan dana zakat. Bank syariah diwajibkan untuk lapor dalam hal sumber dan penggunaan dana zakat selama periode waktu tertentu dalam laporan keuangan. Pelaporan tersebut diantaranya ialah terkait dengan keterlambatan pembayaran piutang dan posisi keuangan perusahaan juga harus diungkapkan oleh bank syariah secara lengkap dalam posisi keadaan perusahaan dalam keadaan baik maupun saat perusahaan dalam keadaan buruk.

2. Tema Produk dan Jasa

Aspek yang perlu diungkapkan dalam tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Konteks perbankan syariah, status kehalalan produk dan jasa dapat diungkapkan melalui opini yang disampaikan oleh DPS (Othman & Thani, 2010). Dewan

Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, sepanjang kegiatan bank mempersoalkan kualitas dan kuantitas pengungkapan ISR yang lebih condong sebagai tanggung jawab manajemen dan setiap produk baru bank syariah harus mendapat persetujuan dari DPS. Hal ini penting dilakukan karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang syariat.

Aspek lain yang perlu diungkapkan pada tema ini ialah *glossary* atau definisi produk serta akad yang melandasi produk tersebut. Akad-akad di bank syariah masih menggunakan istilah-istilah asing di telinga masyarakat, sehingga diperlukannya informasi terkait definisi akad-akad tersebut agar mudah dipahami oleh pengguna informasi.

3. Tema Karyawan

   Islamic Social Reporting mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan dari konsep etika amanah dan keadilan sosial. Pengungkapan informasi disini ialah masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar. Informasi yang diungkapkan diantaranya adalah jam kerja, hari libur, tunjangan untuk karyawan, serta pendidikan dan pelatihan karyawan (Haniffa, 2002).

   Aspek yang lain adalah kebijakan remunerasi untuk para karyawan seperti hari libur, cuti, tunjangan kerja, bonus serta kuntungan lainnya, kesamaan peluang karir untuk seluruh karyawan tidak mengenal *gender*,

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dari kelompok khusus seperti cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan (Othman & Thani, 2010).

4. Tema Masyarakat

Konsep dasar pada tema masyarakat adalah *ummah, amanah* dan *adl*. Islam menekankan kepada sesama umatnya untuk saling tolong menolong. Bentuk untuk saling tolong menolong pada bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, wakaf, *qard* (Haniffa, 2002). Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Hal itu merupakan salah satu fungsi bank syariah yang diamanahkan oleh syariat dan Undang-Undang.

Aspek lainnya pada tema ini ialah sukarelawan dari para kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para kelulusan atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama (Othman & Thani, 2010).

5. Tema Lingkungan

Konsep dasar tema lingkuangana dalah mizan, *I'tidal, khilafah dan akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Allah

menyeru umat islam untuk senantiasa menjaga memelihara dan melestarikan bumi termasuk lingkungan. Tetapi manusia mempunyai sifat dasar yaitu rakus yang telah merusak lingkungan di bumi. Kewajiban manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan telah di peringatkan oleh Allah SWT melalui firmannya dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 (Othman & Thani, 2010) :

"Telah namppak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan ini adalah konservasi lingkuangan hidup, mengurangi efek pemanasan global, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan dibidang lingkungan hidup, dan system manajemen lingkungan (Othman & Thani, 2010).

6. Tema Tata Kelola Perusahaan

Aspek yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan ini adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi dan Dewan Pengawas Syariah, laporan tanggung jawab DPS dan direksi, struktur kepemilikan saham, penerapan fungsi kepatuhan bank, serta kebijakan anti korupsi dan anti pencucian uang (Othman & Thani, 2010). Implementasi pada tema ini telah di atur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/OBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan

Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah UUS).

Islamic Social Reporting memiliki dua hal penting menurut (Othman, 2009) yang pertama adalah Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan bagi seluruh orang yang ada di lingkungan perusahaan seperti karyawan, pelanggan, distributor, dan seluruh anggota masyarakat yang ikut beroprasi dalam bisnis tersebut. Kedua ialah tanggungjawab perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam upaya menciptakan nilai atau manfaat agar mencapai kesejahteraan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah membahas dan menguji pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting*. Penelitian yang diuji dalam corporate governance antara lain Ukuran Dewan Komisaris (UDK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda, baik yang berpengaruh signifikan maupun tidak berpengaruh signifikan, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh (Othman, 2009) dengan judul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia* dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk menyediakan pelaporan sosial islam. Terdapat empat karakteristik perusahaan yang dijadikan faktor dalam penelitiannya yaitu ukuran, profitabilitas, komposisi dewan komisaris dan jenis industri. Metode

penelitian yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda, hasilnya menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan komposisi dewan secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk digunakan sebagai penyediaan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum, Mutmainah, Setyono, & Qizam, 2017) yang berjudul *The Impact of Good Corporate Governance, Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in* Indonesia bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen tata kelola perusahaan (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR). Metode analisis penelitiannya menggunakan analisis konten untuk mengevaluasi pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan indeks ISR. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh unsur GCG (dewan komisaris, komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan regresi panel. Hasilnya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah tahun 2011-2014. Sementara itu, dewan direksi tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah Indonesia tahun 2011-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartawati, Sulindawati, & Kurniawan, 2017) yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja sosial, kinerja lingkungan dan komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

(ISR) pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) periode tahun 2014-2016 bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja sosial, kinerja lingkungan dan komite audit terhadap pengungkapan ISR. Metode analisis dari penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji t. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Begitupun komite audit yang tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Yulianto, 2015) bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* (kepemilikan, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan ukuran komite audit) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sementara itu, profitabilitas, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu & Cahyati, 2014) bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia dan untuk menguji bagaimana pengaruh dewan pengawas syariah (DPS), konferensi DPS, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan

komisaris CSR dalam perbankan islam di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa semua perusahaan perbankan syariah telah melakukan CSR, ukuran Dewan Pengawas Syariah, konferensi Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Leverage tidak mempengaruhi pengungkapan ISR dalam perbankan syariah, sedangkan profitabilitas mimiliki pengaruh negatif dan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Purwanti, 2016) bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan aspek lingkungan dan aspek produk jasa perbankan pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting* (ISR) periode tahun 2013-2015. Analisis yang digunakan adalah isi dan regresi sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah telah memberikan pengaruh signifikan terhadap *Islamic Social reporting* (ISR), sedangkan pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) terbukti tidak signifikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Lestari, 2013) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR) Bank Syariah di Indonesia. Terdapat empat faktor *Islamic Social Reporting* (ISR), diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, usia perusahaan dan komposisi dewan komisaris. Analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi *Islamic Social Reporting* (ISR), namun hal

tersebut berlawanan dengan usia perusahaan dan komposisi dewan komisaris independen.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Baidok & Septiarini, 2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, pengurus dewan syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan ISR indeks ke bank umum Islam selama periode 2010-2014. Data dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah dan rapat dewan pengawas syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap ISR, sementara dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ISR.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Bagi seluruh bank atau perusahaan yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah, memerlukan dewan pengawas syariah. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhitungkan. Tugas dari dewan pengawas syariah ialah suatu badan independen yang tugasnya melakukan pengarahan (directing), melakukan konsultasi (evaluating), pengawasan (supervising) dan pemberian konsultasi (consulting). Hal tersebut memastikan bahwa aktivitas usaha bank syariah benar-benar

mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. Agar aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan rencana para dewan pengawas syariah, maka DPS memerlukan pertemuan-pertemuan yang mampu untuk mendorong sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Baidok & Septiarini, 2016) menunjukkan bahwa Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut didukung oleh (Chariri, 2012) menunjukkan bahwa Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) berpengaruh positif.

H1 = Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Dewan Komisaris ialah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan aturan dasar dan juga memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no 40 tahun 20017 perihal Perseroan Terbatas (Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, 2013). Jika dawan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dana atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memicu kemampuannya untuk

bertindak independen maka perusahaan tersebut akan semakin baik dalam melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Othman, 2009) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen secara signifikan digunakan dalam penyediaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian tersebut didukung oleh (Nurkhin, 2010) menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) .

H2 = Komposisi Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Dewan Direksi mempunyai peran penting dalam melaksanakan operasional perusahaan secara professional dan harus memperhatikan semua pemangku kepentingan. Fungsi utama Dewan Direksi ialah untuk menentukan tujuan dan prinsip strategis yang menjadi patokan bank syariah. Karena tanggung jawab Dewan Direksi dalam menentukan tujuan strategis yaitu pengungkapan *Islamic Social Reporting* maka jumlah Dewan Direksi yang semakin banyak akan sangat baik dan berpengaruh dalam berjalannya operasional perusahaan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu & Cahyati, 2014) menunjukkan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap

pengungkapan *Islamic Social Rreporting*. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Oktafia & Khairin, 2014) menunjukkan bahwa Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* .

H3 = Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Komite Audit memiliki pengawasan independen dalam proses kontrol dan risiko. Komite audit dibentuk untuk menjalankan tugasnya dalam membantu dewan komisaris. Nantinya komite audit akan bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada *stakeholder*. Informasinya ialah berupa pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besarnya komite audit merupakan harapan agar komite audit dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen yang lebih baik dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap perusahaan maupun masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Gestari, 2014) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian tersebut didukung oleh pernyataan (Mahdalena, 2017) ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H4 = Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR)

2.4.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

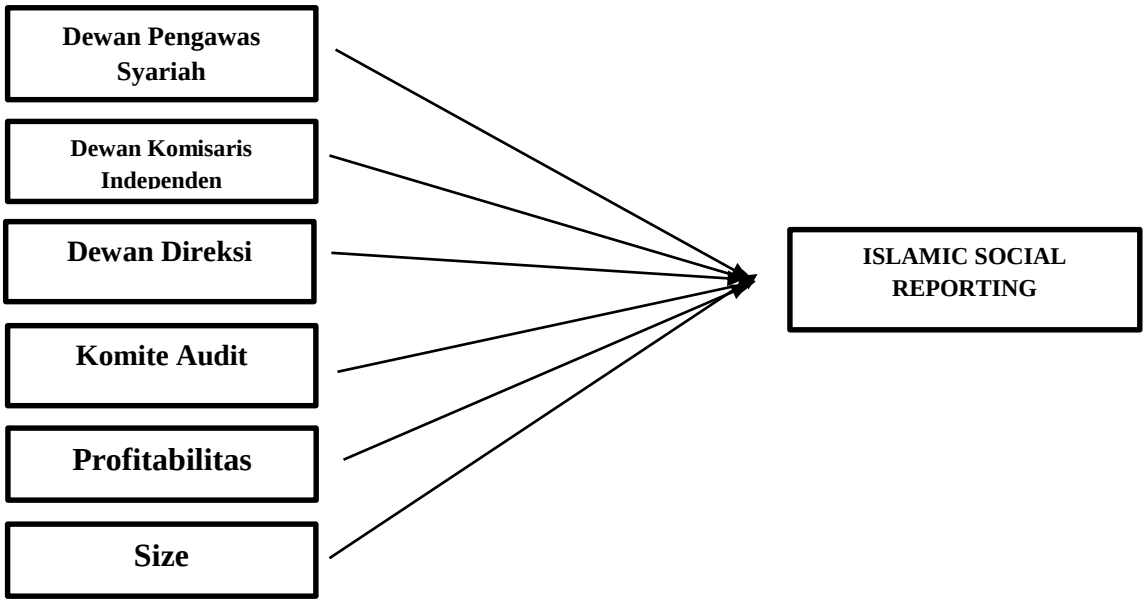
Secara terminology profitabilitas dapat di sebut juga dengan kinerja ekonomi (*economic performance*). Pengukuran profitabilitas dapat digunakan dengan berbagai cara yaitu ROA, ROE, ROI, EPS deviden dalam suatu periode margin. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada suatu periode tertentu. Jika profitabilitas tinggi maka hal itu menunjukkan ketersediaanya dana yang lebih untuk melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan hal tersebut ialah sebagai bukti akuntabilitas kepada *stakeholder* dan meyakinkan pada perusahaan dan masyarakat bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan noerma dan nilai sosial.

Penelitian telah dilakukan oleh (Widiawati, 2012) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Pernyataan tersebut didukung oleh ROA yang dipilih dalam penelitian (Othman & Thani, 2010) yang menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

H5 = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Gambar 2.1

Kerangka Pikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Populasi dalam penelitian ini ada 12 umum bank syariah yang ada di Indonesia (www.sahamok.com) . Analisis yang digunakan adalah *annual report* bank umum syariah. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, maksudnya ialah hanya data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Sample dalam penelitian ini ada 11 Bank Umum Syariah dikarenakan bank tidak memenuhi kriteria yaitu nilai profitabilitas (ROA) yang dimiliki bank tersebut adalah negatif. Adapun data yang memenuhi kriteria penelitian sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunannya pada periode tahun 2014-2017, yang dapat diakses *website* masing-masing perbankan.
2. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian seperti tata kelola perusahaan, laporan tanggung jawab sosial dan laporan keuangan pada laporan tahunan.
3. Menggunakan satuan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya.
4. Mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Tabel 3.1

Daftar Bank Syariah di Indonesia

	Nama Bank Umum Syariah Indonesia	**Web-site**
1	Bank BCA Syariah	www.bcasyariah.co.id
2	Bank BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
3	Bank BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
4	Bank Jawa Barat Syariah	www.bjbsyariah.co.id
5	Bank Maybank Syariah Indonesia	www.maybanksyariah.co.id
6	Bank Muamalat Indonesia	www.bankmuamalat.co.id
7	Bank Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
8	Bank Syariah Bukopin	www.syariahbukopin.co.id
9	Bank Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id
10	Bank Mega Syariah	www.megasyariah.co.id
11	Bank Victoria Syariah	bankvictoriasyariah.co.id

3.2. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Disebut dengan penelitian kuantitatif karena penelitian ini membutuhkan pengujian untuk membuktikan bagaimana kebenerannya dan hipotesis yang sudah dirumuskan (Haribowo, 2015). Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah, berdasarkan data dari *annual report* dan *sustainability report* bank syariah yang bisa di unduh di masing-masing website bank syariah. Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (X_1), Komposisi Dewan Komisaris Independen (X_2), Ukuran Dewan Direksi (X_3), Ukuran Komite Audit (X_4) dan Profitabilitas (X_5) terhadap *Islamic Social*

Reporting (Y) pada perusahaan perbankan syariah dan size company sebagai variable kontrol.

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variable Independen dalam penelitian ini terdiri dari Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, dan Profitabilitas. Sedangkan Variabel Dependennya ialah *Islamic Social Reporting* (ISR) dan Variabel Kontrol ialah *Size Company*.

3.3.1. Variabel Independen

a. Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah dihitung dari jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun (Purwanti, 2016).

b. Dewan Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Independen dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota komisaris independen dibagi total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan dikali 100%.

$$\textbf{DKI} = \frac{\text{Jumlah dewan kom.independen}}{\text{Jumlah total dewan komisaris}} \text{ x } 100\%$$

c. Dewan Direksi

Ukuran Dewan Direksi dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

$$\textbf{DD} = \Sigma \text{ Anggota Dewan Direksi}$$

d. Komite Audit

Ukuran Komite Audit dapat diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.

KA = Σ Anggota Komite Audit

e. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam rangka memperoleh suatu laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Return On Assets, maksudnya ROA ialah kemampuan manajemen dalam mengatur aktiva-aktivanya dengan optimal sehingga dapat mencapai laba bersih yang diinginkan. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa banyak laba yang diperoleh perusahaan dari hasil pengelolaan aktiva (Horne & Wachowicz, 2013).

$$\textbf{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \text{ x } 100\%$$

3.3.2. Variabel Depeden

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Variabel dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang berarti tingakat pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip islam. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR), dengan ketentuan penilaian yaitu, nilai 0 diterapkan jika sama skali tidak adanya pengungkapan yang berhubungan dengan komponen tersebut dan nilai 1 diterapkan jika pengungkapan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan Indeks *Islamic Social Reporting* yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya (Othman, 2009) dengan 6 tema dan dari tema tersebut terbagi menjadi beberapa item lagi. Enam tema pengungkapan, diantaranya :

1. Tema Investasi dan Keuangan (6 item)
2. Tema Produk dan Jasa (4 item)
3. Tema Tenaga Kerja (10 item)
4. Tema Sosial (11 item)
5. Tema Lingkungan (7 item)
6. Tema Tata Kelola (5 item)

Perhitungan indeks ISR dirumuskan sebagai berikut :

$$\textbf{ISR Disclosure} = \frac{\text{Jumlah Disclosure yang dipenuhi}}{43} \text{x}100\%$$

3.4.Variabel Kontrol

Size Company

Size Company merupakan jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Variable size company dapat diukur dengan cara mentransformasikan jumlah aktiva yang di miliki oleh suatu perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural.

$$\textbf{\textit{SIZE}} = \textit{Log}\ (\text{Total Asset})$$

3.5 Alat Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data yang dapat dilihat dari mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

3.5.2 Pengujian Asusmsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghindari esmasi yang bias.untuk membuktikan hipotesa dalam penelitian ini, digunakan uji Normalitas, uji Multikolinearitas, dan uji Heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

   Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yang mana jika untuk lulus asumsi normalitas dengan uji K-s kriteria pengujian K-s lebih besar daripada α = 5% (0,05).

2. Uji Multikolinearitas

   Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi adanya korelasi antar variable *independen* (bebas). Model regresi dapat dikatakan baik jika diantara variable-variabel bebasnya tidak terjadi korelasi (Ghozali, 2006).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika korelasi maka terjadi autokorelasi (Ghozali, 2006). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan uji *run test*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Nilai test > sig 0,05 sehingga residual dapat diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Adapun kriteria dari uji run test sebagai berikut :

H0 : residual (res_1) random (acak)

HA : residual (res_1) tidak random

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang menggunakan model regresi linear berganda (*Multipple Regression*). Regresi Berganda adalah regresi yang memiliki satu variable dependen dan lebih dari satu variable independen. Persamaan regresinya ialah sebagai berikut :

$$\mathbf{ISR} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta_1}\mathbf{DPS} + \boldsymbol{\beta_2}\ \mathbf{DK} + \boldsymbol{\beta_3}\ \mathbf{DD} + \boldsymbol{\beta_4}\ \mathbf{KA} + \boldsymbol{\beta_5}\ \mathbf{ROA} + \boldsymbol{\beta_6}\ \mathbf{SIZE} + \boldsymbol{\epsilon}$$

Keterangan :

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefesien regresi masing-masing variabel

ISR = *Islamic Social Reporting*

DPS = Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

DK = Komposisi Dewan Komisaris Independen

DD = Ukuran Dewan Direksi

KA = Ukuran Komite Audit

ROA = Profitabilitas

Size = Size Company

ε = Kesalahan estimasi (*error term*)

3.5.4 Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t atau Uji signifikan parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji T digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

3.5.5 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F atau uji signifikan simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Dengan memperhatikan signifikan besaran F pada output

perhitungan tingkat alfa (α) = 5%, syarat yang ditentukan ialah besaran F signifikan (signifikan F$\leq$ 0,05) dapat mengetahui variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.6 Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Uji Koefesien determinasi (R^2) dalam penelitian ini mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Pada nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R square, bila hasilnya positif berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, saat nilai adjusted R square berniali negative berarti variabel independen tidak bisa menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan menguraikan penelitian mengenai Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS), Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI), Ukuran Dewan Direksi (UDD) dan Ukuran Komite Audit (UKA) sebagai variabel independen, *Islamic Social reporting* (ISR) sebagai variabel dependen dengan Ukuran Perusahaan (*Size*) sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari masing-masing *web-site* Bank Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014-2017. Hasil dari pengumpulan data tersebut ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

4.1 Statistik Deskriptif

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan diolah dengan menggunakan alat statistik yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan alat statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Pengujian statistik deskriptif mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang akan diteliti. Pengolahan statistik deskriptif menunjukkan mengenai ukuran sampel yang diteliti, rata-rata (*mean*), simpangan baku (*standard deviation*), maksimum dan minimum dari masing-masing variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FRDPS	44	8.00	22.00	14.0227	3.27420
KDKI	44	.25	1.00	.6754	.20159
UDD	44	3.00	7.00	4.3636	1.12252
UKA	44	2.00	7.00	3.9318	1.33639
ROA	44	-9.51	5.50	-.0555	2.94320
ISR	44	.09	.88	.6073	.20851
SIZE	44	8.00	17.27	13.2625	2.92392
Valid N (listwise)	44				

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah data dari penelitian ini sebanyak 44 data observasi. Hasil uji diatas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi untuk setiap variabel sebagai berikut :

Variabel Independen pertama ialah Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah menunjukkan jumlah rapat dewan pengawas syariah. Berikut hasil dalam penelitian ini FRDPS memiliki nilai minimum 8,00, nilai maksimum 22,00, nilai rata-rata (mean) 14,0227 dan nilai standard deviation sebesar 3.27420.

Variabel Independen kedua ialah Komposisi Dewan Komisaris Independen menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris independen pada bank syariah. Berikut hasil dalam penelitian ini KDKI memiliki nilai minimum 0,25 atau 25% terendah anggota dewan komisari independen, nilai maksimum 1,00, nilai rata-rata (mean) 0,6754 dan nilai standard deviation sebesar 0,20159.

Variabel Independen ketiga ialah Ukuran Dewan Direksi menunjukkan jumlah anggota dewan direksi pada bank syariah. Berikut hasil dalam penelitian ini UDD

memiliki nilai minimum 3,00, nilai maksimum 7,00, rata-rata (mean) 4,3636 dan nilai standard deviation sebesar 1,12252.

Variabel Independen keempat ialah Ukuran Komite Audit menunjukkan jumlah anggota komite audit pada bank syariah. Berikut hasil dalam penelitian ini UKA memiliki nilai minimum 2,00, nilai maksimum 7,00, nilai rata-rata (mean) 3,9318 dan nilai standard deviation sebesar 1,33639.

Variabel Independen kelima ialah *Return on Asset* atau Profitabilitas menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Berikut hasil dalam penelitian ini ROA memiliki nilai minimum -9.51, maksimum 5,50, rata-rata (mean) -.0555 dan standard deviation sebesar 2.94320.

Variabel Dependen *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dilakukan dengan menggunakan nilai (skor) didapat dari analisis tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berikut hasil dalam penelitian ini ISR memiliki nilai minimum 0,09 atau 9%, nilai maksimum 0,88 atau 88%, nilai rata-rata (mean) 0,6037 atau 60,37% dan nilai standard deviation sebesar 0,20851 atau 20,851%.

Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan (*Size*) menunjukkan jumlah nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan. Berikut hasil dalam penelitian ini *Size* memiliki nilai minimum sebesar 8,00, nilai maksimum 17,27, nilai rata-rata (mean) 13,2625, dan nilai standard deviatiaon sebesar 2,92392.

4.2 Uji Asumsi Kalsik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data memiliki tujuan yaitu menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik ialah yang memiliki distribusi normal dan mendekati normal. Nilai signifikansi dari residual yang berdistribusi secara normal adalah jika nilai asymp . *Sig (2-tailed)* dalam pengujian *one sample kolmogrof-smirnov* Uji (K-S) test lebih dari $\alpha = 0,05$. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18040385
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.072
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdsarkan hasil uji normalitas pada table 4.2 menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0,121 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5% atau 0,05. Oleh karena itu pada penelitian yang telah terdistribusi secara normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian

adanya multikolinearitas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) (Ghozali, 2006). Jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikoliearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.515	.291		1.772	.085		
	FRDPS	-.002	.009	-.031	-.212	.834	.925	1.081
	KDKI	-.222	.158	-.215	-1.403	.169	.865	1.156
	UDD	-.005	.037	-.026	-.133	.895	.523	1.913
	UKA	.064	.029	.409	2.209	.033	.590	1.695
	ROA	.006	.010	.079	.532	.598	.925	1.081
	SIZE	.003	.010	.042	.291	.773	.953	1.049

a. Dependent Variable: ISR

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa nilai VIF adalah < 10. Nilai VIF dari FRDPS sebesar 1.081; nilai VIF dari KDKI sebesar 1,156; nilai VIF dari UDD sebesar 1.913; nilai VIF dari UKA sebesar 1.695; nilai VIF dari ROA sebesar 1.081; dan nilai VIF dari Size sebesar 1.049. Sedangkan nilai tolerance > 0,10 atai < 1 dengan nilai *Tolerance* dari FRDPS sebesar 0,925; nilai *Tolerance* dari KDKI sebesar 0,865; nilai *Tolerance* dari UDD sebesar 0,523; nilai *Tolerance* dari UKA sebesar 0,590; nilai *Tolerance* dari ROA sebesar 0,925; dan nilai Tolerance dari SIZE sebesar 0,953. Berdasarkan nilai VIF dan Tolerance dapat

disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian pengujian selanjutnya dapat dilakukan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu dengan uji *run test*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Nilai test > sig 0,05 sehingga residual dapat diterima atau tidak terjadi autokorelasi.Berrikut hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Uji autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	.02068
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	22
Total Cases	44
Number of Runs	19
Z	-1.068
Asymp. Sig. (2-tailed)	.286

a. Median

Sumber : Hasil olah data, 2018

Hasil uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa data pada penelitian residual merupakan data random yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0,286 yang mana hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Sehingga data dalam penelitian terjadi secara

random, maka data tidak terjadi autokorelasi, yang berarti data ini dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokesdasitas dilakukan dengan Uji Glejser, artinya ialah mendeteksi ada atau tidak adanya heterokedastisitas dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Keputusan yang dapat diambil mengenai heterokedastisitas ialah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (probability value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. Berikut hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Uji Heterokedastisitas
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.038	.155		.247	.806
	FRDPS	.009	.005	.281	1.837	.074
	KDKI	-.079	.084	-.148	-.934	.356
	UDD	.013	.019	.139	.683	.499
	UKA	-.027	.015	-.340	-1.771	.085
	ROA	.004	.006	.107	.696	.491
	SIZE	.006	.006	.162	1.072	.291

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa *p-value (sig)* dalam tiap model regresi yang digunakan dalam penelitian ii lebih besar dari 0,05. Nilai Sig pada FRDPS sebesar 0,074; nilai Sig pada KDKI sebesar 0,356; nilai Sig pada UDD sebesar 0,499; nilai Sig pada UKA sebesar 0,85; nilai

Sig pada ROa sebesar 0,491 dan nilai Sig pada Size sebesar 0,291. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam semua model regresi penelitian ini.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini variabel independen diantaranya ialah frekuensi rapat dewan pengawas syariah, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan profitabilitas terhadap variabel dependen ialah *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil regresi linear berganda tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.515	.291		1.772	.085
	FRDPS	-.002	.009	-.031	-.212	.834
	KDKI	-.222	.158	-.215	-1.403	.169
	UDD	-.005	.037	-.026	-.133	.895
	UKA	.064	.029	.409	2.209	.033
	ROA	.006	.010	.079	.532	.598
	SIZE	.003	.010	.042	.291	.773

a. Dependent Variable: ISR

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.6 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

ISR = 0,515 - 0,002FRDPS - 0,222KDKI – 0,005UDD + 0,064UKA + 0,006 ROA + 0,003 SIZE + *e* .

4.4 Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam rangka variasi variabel dependen. Uji hipotesis ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh frekuensi rapat dewan pengawas syariah (FRDPS), komposisi dewan komisaris independen (KDKI), ukuran dewan direksi (UDD), ukuran komite audit (UKA), dan *return on asset* (ROA) terhadap ISR secara individual. Berikut hasil uji t pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.515	.291		1.772	.085
	FRDPS	-.002	.009	-.031	-.212	.834
	KDKI	-.222	.158	-.215	-1.403	.169
	UDD	-.005	.037	-.026	-.133	.895
	UKA	.064	.029	.409	2.209	.033
	ROA	.006	.010	.079	.532	.598
	SIZE	.003	.010	.042	.291	.773

a. Dependent Variable: ISR

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas untuk uji parsial diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Variabel independen pertama ialah frekuensi rapat dewan pengawas syariah (FRDPS) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$, yaitu sebesar 0,834. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,834 > 0,05). Sehingga menunjukkan

bahwa variabel independen pada frdps tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).

2. Variabel independen kedua ialah komposisi dewan komisaris independen (KDKI) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,169. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,169 > 0,05). Sehingga menunjukkan bahwa variabel independen pada kdki tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR).
3. Variabel independen ketiga ialah ukuran dewan direksi (UDD) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,895. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,895 > 0,05). Sehingga menunjukkan hasil variabel independen pada udd tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Islamic Social reporting* (ISR).
4. Variabel independen keempat ialah ukuran komite audit (UKA) secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,033. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya kurang dari 0,05 (0,033 < 0,05). Sehingga menunjukkan hasil bahwa variabel independen yaitu ukuran komite audit (UKA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR).
5. Variabel independen kelima ialah profitabilitas (ROA) secara statistik menujukkan hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,598. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,598 >

0,05). Sehingga menunjukkan hasil variabel independen pada ROA tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.5 Uji Simultan (Uji-F)

Uji statistik F pada dasarnya adalah model regresi yang menyatakan layak jika angka signifikansi F pada tabel ANOVA < 0,05. Adapun hasil uji ketepatan modle dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.470	6	.078	2.071	.080[b]
	Residual	1.399	37	.038		
	Total	1.869	43			

a. Dependent Variable: ISR
b. Predictors: (Constant), SIZE, UKA, FRDPS, KDKI, ROA, UDD

Sumber : Hasil olah data, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tabel Anova mempunyai nilai 0,080 yang artinya nilai signifikan F pada tabel Anova > 0,05 atau (0,080 > 0,05) dengan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS), Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI), Ukuran Dewan Direksi (UDD), Ukuran Komite Audit (UKA), dan Profitabilitas (ROA) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.6 Koefesien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai koefisien determinasi dilihat dari nilai adjusted R square, bila hasilnya positif berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Koefesien Determinasi (R^2)
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.501[a]	.251	.130	.19448

a. Predictors: (Constant), SIZE, UKA, FRDPS, KDKI, ROA, UDD
b. Dependent Variable: ISR

Sumber : Hasil olah data, 2018

Dari Tabel 4.9 diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R^2 sebesar 0,130 atau 13,00%. Hasil ini berarti ialah 13,00% variasi pengungkapan ISR dapat dijelaskan oleh variabel frekuensi rapat dewan pengawas syariah (FRDPS, komposisi dewan komisaris independen (KDKI), ukuran dewan direksi (UDD), ukuran komite audit (UKA) dan *return on asset* (ROA), yang mana sisanya yaitu 87% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data

4.7.2 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa jumlah sedikit atau banyaknya rapat Dewan Pengawas Syariah tidak membuat tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* bertambah luas ataupun

sebaliknya. Kondisi seperti ini mengidentifikasi boleh jadi bahwa pengungkapan dalam Laporan Tahunan bersifat sebagai formalitas yang artinya hanya memenuhi ketaatan laporan saja karena sudah diatur oleh regulator, sehingga dalam hal tersebut tidak dibutuhkannya seberapa sering atau tidak dilakukan suatu pertemuan. Boleh jadi juga sedikit banyaknya jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah tidak membahas apa yang mereka pertanggungjawabkan sebagaimana tugas dari Dewan Pengawas Syariah, karena diperbolehkannya Dewan Pengawas Syariah merangkap jabatan maka mereka membahas mengenai tugas dan tanggung jawab selain sebagai Dewan Pengawas Syariah pada saat rapat. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa sedikit atau banyaknya rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2016) yang menyebutkan bahwa pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) terbukti tidak berpengaruh signifikan.

4.7.3 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa para Dewan Komisaris Independen terlihat tidak mampu dan efektif dalam memberikan pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas manajemen. Dapat dilihat dari rata-rata proporsi Dewan Komisaris Independen yang tinggi yaitu sebesar 60,73% disebabkan karena mungkin

pengungkapan *Islamic Social Reporting* dari CSR bersifat sukarela dan terdapat pertimbangan biaya dan juga manfaat dari CSR. Penyataan tersebut membuktikan bahwa meskipun rata-rata proporsi yang tinggi namun tetap saja sebagai dewan komisaris mereka akan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang akan berkaitan dengan pembiayaan dari manfaat *Islamic Social Reporting*. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak melakukan pengungkapan secara penuh pada CSR dan akhirnya pengungkapan pada *Islamic Social Reporting* juga tidak maksimal.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawassan kepada manajemen belum maksimal. Meskipun jumlah anggota Dewan Komisaris independen mempunyai rata-rata yang cukup tinggi atau lebih dari Dewan Komisaris non-independen hal itu menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris independen sesuai agar tidak kalah dalam setiap kali perdebatan. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chariri, 2012), (Qoyum, Mutmainah, Setyono, & Qizam, 2017) dan (Nugroho & Yulianto, 2015) yang menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan komposisi dewan komisaris independen terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa jumlah sedikit atau banyaknya direksi didalam suatu perusahaan tidak membuat tingkat

pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) semakin luas ataupun sebaliknya. Didalam prinsip Islam disebutkan bahwa seorang Dewan Direksi sebagai seorang Muslim dan berada di suatu organisasi adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan dengan penuh kehati-hatian menjalankan sesuai dengan prinsip syariah. Direksi yang sudah lulus *fit and proper test* (uji kemapuan dan kepatuhan) dari OJK yang menjadikan direksi sudah pasti bisa menangani hal-hal yang akan terjadi sesuai kemampuan yang mereka miliki. Artinya semua sudah menjadi tugas dan tanggung jawab direksinya masing-masing, jadi tidak ada bedanya untuk pengungkapan ISR yang luas atau lebih baik pada suatu bank syariah diharus memiliki jumlah direksi yang sedikit ataupun banyak (Bukair & Rahman, 2015). Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum, Mutmainah, Setyono, & Qizam, 2017) dan (Bukair & Rahman, 2015) yang menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan ukuran dewan direksi terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.7.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa jumlah sedikit atau banyaknya ukuran komite audit berpengaruh terhadap perluasan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, maka peran pada komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak

semakin efektif dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap perusahaan maupun masyarakat. Komite Audit dalam hasil penelitian ini juga mampu dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh yakni Komite Audit berhasil dalam menagwasi laporan keuangan, pengawasan atau manajemen dan risiko control, dan tata kelola perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada suatu perusahaan akan semakin luas atau lebih baik. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Gestari, 2014) dan (Mahdalena, 2017) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif siginifikan ukuran komite audit terhdap *Islamic Social Reporting* (ISR).

4.7.6 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa luas atau lebih baiknya suatu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak bergantung pada besar atau kecilnya profit yang dihasilkan suatu bank syariah. Ketika suatu bank memiliki profit yang tinggi atau rendah, bank syariah akan tetap melakukan pelaporan tanggung jawab sosial, itu berarti bank syariah akan tetap melakukan pengungkapan sebagai salah satu cara agar siapapun yang akan menggunakan laporan bisa melihat kinerja dari suatu bank atau perusahaan itu sendiri. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hartawati,

Sulindawati, & Kurniawan, 2017) dan (Rahayu & Cahyati, 2014) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR), peneliti dapat mengambil kesimpulan :

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut dikarenakan boleh jadi bahwa pengungkapan dalam Laporan Tahunan bersifat sebagai formalitas yang artinya hanya memenuhi ketaatan laporan saja karena sudah diatur oleh regulator, sehingga dalam hal tersebut tidak dibutuhkannya seberapa sering atau tidak dilakukan suatu pertemuan Dewan Pengawas Syariah.
2. Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Dilihat dari rata-rata proporsi Dewan Komisaris Independen yang tinggi yaitu sebesar 60,73%, penyataan tersebut membuktikan bahwa rata-rata proporsi yang tinggi disebabkan oleh semakin banyaknya pertimbangan dan koordinasi yang harus dilakukan. Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak melakukan pengungkapan secara penuh pada CSR dan akhirnya pengungkapan pada *Islamic Social*

Reporting juga tidak maksimal.independen maka akan selalu kalah dalam setiap kali perdebatan.

3. Ukuran Dewan Direksi (UDD) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut dikarenakan jumlah sedikit atau banyaknya direksi didalam suatu perusahaan tidak membuat tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) semakin luas ataupun sebaliknya. Didalam prinsip Islam disebutkan bahwa seorang Dewan Direksi sebagai seorang Muslim dan berada di suatu organisasi adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dan dengan penuh kehati-hatian menjalankan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Ukuran Komite Audit (UKA) berpengaruh positif signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Artinya jumlah sedikit atau banyaknya ukuran komite audit maka peran pada komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap perusahaan maupun masyarakat.
5. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal tersebut dikarenakan luasnya atau lebih baiknya suatu pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak bergantung pada besar atau kecilnya profit yang dihasilkan suatu bank syariah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa dijadikan sebagai arah penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah (FRDPS), komposisi Dewan Komisaris independen (KDKI), ukuran Dewan direksi (UDD), ukuran Komite Audit (UKA) dan profitabilitas (ROA) dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil yang berbeda akan diperoleh apabila peneliti menambahkan variabel-variabel lain yang terkait.
2. Metode *content analysis* dalam penelitian ini masih terjadi subjektifitas dalam melakukan interpretasi terhdap pokok pengungkapan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti kepemilikan perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan yang nantinya dapat berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR).
2. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan periode waktu agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

Al-Tuwaijiri, S. (2004). The relation among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach. *Accounting, Organizations and Society 29*, 447-471.

Anggraini, F., & Reni, R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Infoormasi Sosial dalam Laporang Keuangan Tahunan: (Study Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI). *Proceedings SNA IX*.

Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.* Depok: Tazkia Cendekia.

Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1020-1034.

Bukair, A. A., & Rahman, A. R. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research, Vol. 7 (2)*, 506-519.

Chariri, C. (2012). Analisis Pengaruh islamic corporate governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal of Accounting*.

Defri. (2012). Pengaruh capital adequacy ratio, likuiditas dan efesiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. *Jurnal Manajemen, Vol. 10*, 1-18.

Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *Ekonomi Islam La_Riba. Vol VII, No.1*, 1-14.

Gestari, I. (2014). Pengungkapan Good Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Perngungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indoensia. *Fakultas Ekonomi Studi Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haniffa, R. (2002). Social Reporting Discloure-An Islamic Perspective . *Indonesian Management & Accounting Research 1(2)*, 128-146.

Haribowo, I. (2015). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility (studi kasus pada bank syariah di Indonesia). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 5 No1*.

Hartawati, E., Sulindawati, E., & Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja sosial, kinerja lingkungan dan komite audit terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 8, No 2*.

Horne, J., & Wachowicz, J. (2013). *Prinsip-prinsip MAnajemen Keuangan. Edisi 13 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

Indra, S., Ubud, S., & Eko, G. &. (2017). The Impact of Islamic Corporate Governance, Islamic Intellectual Capital and Islamic Financial Performance on Sustainable Business Islamic Banks. *International Journal of Economics and Financial Issues* , 316-322.

Johan, A., & Eke, A. (2016). Islamic Corporate Resposibility discloure, reputasi, dan kinerja keuangan : Studi pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 38-46.

Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indoenesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 8(1)*, 1-9.

Kasmir. (2010). *Pengantar Manajamen Keuangan.* Jakarta: Kencana.

Lestari, P. (2013). Determinants Of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case Of Indonesia. *International Journal. Vol 5 (10)*, 28-34.

Mahdalena. (2017). Pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, ukuran komite audit dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility berdasarkan indeks yang terdaftar di Bank Indonesia.

Muhammad, M. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah.* Yogyakarta: Unit Pernerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN.

Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terhadap JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 1-12.

Nurkhin, A. (2010). Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Social Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No.1*, 46-55.

Oktafia, Y., & Khairin, F. N. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Konferensi Regional Akuntansi II*.

Othman. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Journal International Studies Issue*.

Othman, R., & Thani, A. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 135-144.

Permata, S. V., & Mildawati, T. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Deangan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2(5)*, 1-15.

Purwanti, A. (2016). Dewan pengawas syariah dan pengungkapan aspek lingkunga, produk dan jasa pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vp;. 4, No.2*, 169-181.

Qoyum, A., Mutmainah, L., Setyono, J., & Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance, Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Iqtiskadia. Vol 10 No 1*, 130-159.

Rahayu, R. S., & Cahyati, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PErbankan Syariah . *JRAK Vol.5 No 2*, 74-87.

Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Islamic Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 5 No.1*, 87-104.

Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, A. (2017). Intervening, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, 67-77.

Setiawan, I., Asnawi, H., & Sofyani, H. (2016). Apakah Ukuran, Profitabilitas, dan Praktik Manajemen Laba Mempengaruhi Tingkat Pelaksanaan dan Pelaporan Islamic Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Vol 3(2)*, 65-76.

Siswanti, I., Ubud, S., & Ganis, E. (2017). The Impact of Islamic Corporate Governance, Islamic Intellectual Capital and Islamic Financial Performance on Sustainble Business Islamic Banks. *International Jurnal of Economic and Financial Issues Vol 7*, 316-323.

Sugiyono, D. (2007). *Statistika untuk penelitian.* Bandung: CV ALFABETA.

Widiawati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ISR Perusahaan-Perusahaan yang Terdapat pada DES Tahun 2009-2011. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif Disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pengungkapan ISR Tahun 2014

No	Kode	A	1	2	3	4	5	6	TA	B	7	8	9	10	TA	C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TA
1	**BCAS**		0	0	1	0	0	1	2		0	0	0	0	0		0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3
2	**BNIS**		0	0	1	1	1	1	4		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
3	**BRIS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	0	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	**BJBS**		0	0	1	0	0	1	2		1	1	1	1	4		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	**BMSI**		0	1	1	0	0	1	3		1	1	1	0	3		0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	5
6	**BMI**		0	1	1	0	0	1	3		0	1	1	1	3		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
7	**BPS**		0	0	1	0	0	1	2		1	1	1	0	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	**BSB**		0	1	1	0	0	1	3		1	1	1	0	3		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
9	**BSM**		0	1	1	1	0	1	4		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
10	**BMS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1	4		0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
11	**BVS**		0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TA	E	32	33	34	35	36	37	38	TA	F	39	40	41	42	43
	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9		0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		1	0	0	0	1	1	1	4		1	1	1	1	1
	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	6		1	0	0	1	1	0	0	3		1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	7		0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9		1	0	1	1	0	0	0	3		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10		1	0	1	1	1	1	1	6		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	8		1	0	0	1	0	0	0	2		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	8		1	0	0	1	1	0	0	3		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	9		1	0	1	1	1	1	1	6		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	9		0	0	0	1	0	0	0	1		1	1	1	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	0

TA	TOTAL PENGUNGKAPAN	INDEKS ISR
3	14	0.3256
5	29	0.6744
3	18	0.4186
3	14	0.3256
5	23	0.5349
3	24	0.5581
5	16	0.3721
3	19	0.4419
5	29	0.6744
5	22	0.5116
3	4	0.0930

Pengungkapan ISR Tahun 2015

No	Kode	A	1	2	3	4	5	6	TA	B	7	8	9	10	TA	C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TA
1	**BCAS**		0	0	1	0	0	1	**2**		0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	**7**
2	**BNIS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	**8**
3	**BRIS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	0	**3**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
4	**BJBS**		0	1	1	0	0	1	**3**		1	1	1	1	**4**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
5	**BMSI**		0	1	1	0	0	1	**3**		1	1	1	0	**3**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
6	**BMI**		1	1	1	0	0	1	**4**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	**9**
7	**BPS**		0	1	1	0	0	1	**3**		1	1	1	0	**3**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
8	**BSB**		1	1	1	0	1	1	**5**		1	1	1	0	**3**		1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	**7**
9	**BSM**		0	1	1	1	0	1	**4**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**6**
10	**BMS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	**5**
11	**BVS**		0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	**3**		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	**2**

D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TA	E	32	33	34	35	36	37	38	TA	F	39	40	41	42	43
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	**7**		1	0	0	1	1	0	0	**3**		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	**9**		1	0	1	1	0	1	1	**5**		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	**9**		1	0	0	1	1	0	0	**3**		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	**8**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	**7**		1	0	0	1	1	0	0	**3**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	0	**5**		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	**8**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	**8**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	**2**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	0

TA	TOTAL PENGUNGKAPAN	INDEKS ISR
3	22	0.5116
5	36	0.8372
3	24	0.5581
3	19	0.4419
5	22	0.5116
3	35	0.8140
5	20	0.4651
5	30	0.6977
5	35	0.8140
5	27	0.6279
3	10	0.2326

Pengungkapan ISR Tahun 2016

No	Kode	A	1	2	3	4	5	6	TA	B	7	8	9	10	TA	C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TA
1	**BCAS**		0	1	1	0	0	1	**3**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	**3**
2	**BNIS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**6**
3	**BRIS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	**8**
4	**BJBS**		1	1	1	0	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**3**
5	**BMSI**		1	1	1	1	0	1	**5**		1	1	1	0	**3**		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
6	**BMI**		1	1	1	0	0	1	**4**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	**9**
7	**BPS**		0	1	1	0	1	1	**4**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**6**
8	**BSB**		1	1	1	0	1	1	**5**		1	1	1	0	**3**		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**6**
9	**BSM**		1	1	1	1	0	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	**6**
10	**BMS**		0	1	1	1	1	1	**5**		1	1	1	1	**4**		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	**4**
11	**BVS**		0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	**3**		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**

D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TA	E	32	33	34	35	36	37	38	TA	F	39	40	41	42	43
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	**9**		0	0	0	1	1	0	0	**2**		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	**9**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	0	0	0	1	1	**3**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	**9**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	**7**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	0	**5**		1	1	1	0	0
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	**8**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	**8**		1	0	0	0	0	0	0	**1**		1	1	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	0	0

TA	TOTAL PENGUNGKAPAN	INDEKS ISR
5	26	0.6047
5	35	0.8140
5	35	0.8140
5	26	0.6047
5	22	0.5116
3	35	0.8140
5	33	0.7674
5	35	0.8140
5	36	0.8372
5	27	0.6279
3	9	0.2093

Pengungkapan ISR Tahun 2017

No	Kode	A	1	2	3	4	5	6	TA	B	7	8	9	10	TA	C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TA
1	**BCAS**		0	1	1	0	0	1	3		1	1	1	1	4		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
2	**BNIS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
3	**BRIS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8
4	**BJBS**		1	1	1	0	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
5	**BMSI**		1	1	1	1	0	1	5		1	1	1	0	3		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	**BMI**		1	1	1	1	1	1	6		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
7	**BPS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
8	**BSB**		1	1	1	0	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
9	**BSM**		1	1	1	1	0	1	5		1	1	1	1	4		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6
10	**BMS**		0	1	1	1	1	1	5		1	1	1	1	4		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
11	**BVS**		0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	0	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TA	E	32	33	34	35	36	37	38	TA	F	39	40	41	42	43
	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	0	1	**5**		1	1	1	1	1
	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	**9**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	**9**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	**8**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	0	**5**		1	1	1	0	0
	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	**9**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	1	1	1	1	**6**		1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	**10**		1	0	1	0	1	1	1	**5**		1	1	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**		0	0	0	0	0	0	0	**0**		1	1	1	1	0

TA	TOTAL PENGUNGKAPAN	INDEKS ISR
5	30	0.6977
5	35	0.8140
5	38	0.8837
5	26	0.6047
5	23	0.5349
3	37	0.8605
5	35	0.8140
5	36	0.8372
5	36	0.8372
5	33	0.7674
4	9	0.2093

Lampiran 2

	Pengungkapan item-item	**Pengertian**	**Skor**
A	**Tema Pendanaan dan Investasi**		
1	*Riba Activity*	Aktivitas yang mengandung Riba	1
2	*Gharar*	Pengungkapan yang melakukan Gharar/tidak, sifat memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam islam	1
3	*Zakat* • *Method used* • *Zakatable amount* • *Beneficiaries*	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, bank itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri	1
4	*Policy on Late Repayments and Insolvent Cients/Bad Debts written-off*	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients	1
5	*Currents Value Balance Sheet (CVBS)*	CVBS kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini	1
6	*Value Added Statements (VAS)*	VAS berfungsi sebagai informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan.	1
B	**Tema Produk dan Jasa**		
7	*Green Product*	Produk yang ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah	1

		lingkungan dikenal dengan istilah kredit hijau "green lending". Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitor yang bergerak disektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat	
8	*Halal Status and Quality*	Halal haram menunjukkan suatu produk yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang Muslim	1
9	*Product Safety and Quality*	Kualitas dan keamanan produk dari awal, misalnya bahan terbuat dari apa, bagaimana proses pembuatannya, dijual harga berapa, bagaimana kekuatan produk dipasaran,garansi. Perbankan bisa menjelaskan produk yang mereka jual	1
10	*Customer Complaints/Incidents of non-Compliance*	Pengaduan nasabah	1
C	**Tema Karyawan**		
11	*Nature of work:* • *Working hours* • *Holidays* • *Other benefits*	Sifat pekerjaan, jam kerja perhari, cuti, kesehatan, tahunan dan kesejahteraan, gaji dan lain-lain	1
12	*Education and Training/Human Capital*	Pendidikan dan pelatihan karyawan perbankan syariah	1

	Development		
13	*Equal Opportunities*	Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, yang penting kalau kerjanya baik maka dia dapat diterima dan bekerjan di perusahaan tersebut	1
14	*Employee Involvement*	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya : mengambil keputusan diperusahaan saham harus meminta pendapat/persetujuan dari pemegang saham yang lain, yang notabenenya banyak pemegang saham	1
15	*Health and Safety*	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan	1
16	*Working Enviroment*	Lingkungan atau suasana pekerjaan	1
17	*Employment of other special-interest-group (i.e.handicapped, ex-convits, former drygs-addicts)*	Pekerjaan khusus lainnya-kelompok tertentu (yaitu cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba)	1
18	*Higher enchelons in the company perform the congregational prayers with lover and middle level managers*	Pejabat tinggi di perusahaan melaksanakan sholat berjamaah dengan manajer tingkat bawah dan menengah	1
19	*Muslim employee are allowed to perform their obligatory prayers during specific times and fasting during Ramadhan*	Karyawan muslim diperbolehkan untuk melakukan sholat wajib mereka selama waktu tertentu dan puasa selama Ramadhan pada hari	1

	on their working day	mereka kerja	
20	*Proper place of worship for the employees*	Tempat yang layak untuk beribadah bagi karyawan	1
D	**Tema Masyarakat**		
21	*Saddaqah/Donation*	Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi	1
22	*Waqaf*	Waqaf adalah panahan hak milik atas materi benda dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya	1
23	*Qard Hassan*	*Benevolence loan*, suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan financial	1
24	*Employee Volunteerism*	Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut	1
25	*Education-School Adoption Scheme* • *Scholarships*	Memberikan Beasiswa	1
26	*Graduate Employment*	Lulusan kerja, misalnya dari D3,	1

	(magang/praktik kerja lapangan)	S1, S2, S3 dsb	
27	*Youth Development*	Berkaitan dengan pengembangan generasi muda	1
28	*Underprivileged Community*	Masyarakat kurang mampu	1
29	*Childern Care*	Kepedulian terhadap anak-anak	1
30	*Charities/Gifts/Social Activities*	Aktivitas sosial, misalnya bantuan bencana alam, penyaluran zakat, shadaqah dll	1
31	*Sponsoring Public Health/Recreation Project/Sports/Culturals Events*	Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga, event budaya dll	1
E	**Tema Lingkungan**		
32	*Conversation of Environment*	Perlindungan atau pemeliharaan alam atau lingkungan	1
33	*Endangered Wildlife*	Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa)	1
34	*Environment Pollution*	Pencemaran lingkungan (meminimilisasi polusi, limbah, pengelolaan air dsb)	1
35	*Environment Education*	Berkaitan dengan pendidikan tentang lingkungan	1
36	*Environment Product/Procces Related*	Hubungan produk terhadap lingkungan	1
37	*Environment Audit/Independent Verification Statement/Governance*	Audit Lingkungan / Pernyataan Verifikasi Independen / Pemerintahan	1
38	*Environmental Management*	Sistem / Kebijakan Manajemen	1

	System/Policy	Lingkungan	
F	**Tema Tata Kelola Perusahaan**		
39	*Shariah Compliance Status*	Status kepatuhan Syariah	1
40	*Ownerships Structures :* • *Number of muslim shareholders and its shareholder and its shareholdings*	Struktur kepemilikan atau pemegang saham	1
41	*Directo Board Profil*	Profil Dewan Direksi	1
42	*Forbidden Activities:* - *Monopolistic Practice* - *Hoarding Necessary Goods* - *Price Manipulation* - *Fraudulent Business Practice* - *Gambling*	Pernyataan kegiatan dilarang, seperti praktek monopoli, penimpunan barang yang dibutuhkan, manipulasi harga, praktik bisnis penipuan, perjudian	1
43	*Anti-Corruption Policies*	Kebijakan anti-korupsi	1

Sumber : penelitian Othamn (2009)